



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman A. Bin Abidin umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**

Fitriani Binti Latennang umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Dgl tanggal 04 Pebruari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 26 Agustus 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Latennang dan dihadiri

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi Nikah bernama Anas dan Muslimin, dengan mas kawin berupa cincin emas;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah Pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a. Fatna Sari Bint Sudirman S, umur 18 tahun;

b. Sri Rahmadani Binti Sudirman S, umur 12 tahun;

c. Muh. Rizki Aditya Bin Sudirman S, umur 8 tahun;

5. Bahwah selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwah sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;

7. Bahwah para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada 26 Agustus 1999;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Agustus 1999 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julyanto Nomor 7203251007900001 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Gusniati Nomor 145/1004/Pj.KD-O/VIII/2019/PEMDES tanggal 12 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oto, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi

1. **Muslimin bin Junaing**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala tanggal 24 Nopember 2018;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masruhin, dan yang menjadi saksi nikah adalah Samsu dan Daeng. Mantono;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa cincin emas 5 gram;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Javir Fairul bin

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julyanto, umur 11 bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2. **Ramdan bin M Nasir**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala tanggal 24 Nopember 2018;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masruhin, dan yang menjadi saksi nikah adalah Samsu dan Daeng. Mantono;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa cincin emas 5 gram;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Javir Fairul bin Julyanto, umur 11 bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2018 di Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julyanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 7203251007900001 tanggal 20 Nopember 2017 dan Surat Keterangan Domisili atas nama Gusniati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oto, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, telah bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 283. R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Nopember 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masruhin dan dihadiri dua orang saksi

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Samsu dan Daeng Mantono, dan mas kawin berupa cincin emas 5 gram;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2018 di wilayah

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Julyanto bin Damran**) dengan Pemohon II (**Gusniati binti Masruhin**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;

3. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp -----96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang isbat nikah keliling Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Siti Rabiyyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rabiyyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp. 30.000.00		
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
	Jumlah	:	Rp. 96.000.00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Pen. No.40/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)